

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada beberapa dekade belakangan ini kemajuan pada bidang *Internet Technology and Communication* (ICT) memberikan banyak perubahan terhadap tatanan kehidupan masyarakat. Meskipun pada tahun 2019 kemarin terjadi wabah Covid-19 yang telah melumpuhkan banyak sektor pekerjaan masyarakat namun hal ini justru mendorong adanya perubahan dan pengembangan serta pandangan masyarakat terhadap teknologi dan produk - produk digital lainnya termasuk pada kecenderungan meningkatnya transaksi ekonomi digital pada kawasan ASEAN. Berdasarkan studi dari Google, Temasek, serta Bain & Co. bahwa negara-negara pada kawasan ASEAN sedang memasuki era *digital decade* dilihat dari perkembangan pengguna internet pada kawasan ASEAN yang sudah mencapai 440 juta, yang 350 juta diantaranya merupakan konsumen digital (Brain, 2021). Layanan *Ecommerce* merupakan penggerak ekonomi terbesar pascapandemi Covid-19 dikatakan bahwa *Gross Merchandise Value* (GMV) yang didapatkan oleh *Ecommerce* pada tahun 2021 sebesar \$120 milyar dan terprediksi akan mencapai \$174 milyar pada akhir tahun 2021, meningkat dua kali lipat dari pendapatannya pada tahun lalu. Hal ini terjadi disebabkan oleh meningkatnya permintaan pasar pada sektor penjualan digital dan ikut pedagang-pedagang kecil menengah yang sudah mulai menggunakan platform - platform penjualan digital yang ada (Hoppe, 2021).

Sebagai negara yang memiliki keseluruhan penduduk terbesar dalam urutan ke-4 dunia yang diisi dengan sebagian besar masyarakat generasi milenial dan memiliki total jumlah penduduk pada usia produktif sebesar 191 juta jiwa atau juga 70,7 %, Indonesia memiliki jumlah pengguna ponsel genggam yang dinilai cukup besar, sejumlah 345,3 juta pengguna inilah yang mendorong pesatnya penggunaan

internet secara keseluruhan bagi negaranya (Hoppe, 2021). Dengan jumlah pengguna ponsel yang menyentuh angka tersebut banyak terjadi peningkatan lalu lintas internet setiap tahunnya.

Pada siaran pers di Jakarta pada tanggal 10 November 2021 Menko Airlangga mengatakan bahwa adanya infrastruktur baru tersebut diharapkan tahun 2024 akan dapat menumbuhkan PDB sebesar 1% dan digitalisasi UMKM dapat bertumbuh hingga 50%. Selain itu juga harapan yang ada bagi pertumbuhan bahwa hal tersebut dapat menciptakan nilai tambah perekonomian terutama *enabler* bagi teknologi seperti *drone* dan robot, mobil tanpa awak, *3D printing*, *artificial intelligence*, *big data analysis*, *cloud computing* yang kemungkinan dapat menambah 2,5 juta lapangan kerja baru serta melatih lebih dari 600 ribu talenta digital baru setiap tahunnya. Menurut pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam *AI Innovation Summit 2021* (ekon.go.id, 2021).

“Peluang ekonomi digital Indonesia masih terbuka lebar. Ekonomi digital adalah kekuatan ekonomi baru dan Indonesia harus mengembangkan *Artificial Intelligence* (AI). AI merupakan ‘emas baru’ yang diharapkan mampu menyinergikan berbagai situasi dan berbagai *stakeholder* di dalam kerja sama kolaboratif antara Pemerintah, pelaku usaha, dan para *stakeholder* lainnya”

Ditambah lagi dengan pengguna ponsel di Indonesia yang mencapai angka 345 juta sektor ekonomi digital ini merupakan lahan penting yang harus terus dikembangkan, dengan mempertimbangkan banyaknya peluang yang ada serta semakin kerasnya persaingan yang datang bukan hanya dari dalam negeri saja, namun juga persaingan secara global.

Melihat peluang dari kerja sama Indonesia, Malaysia, dan Thailand merupakan ketiga negara yang memiliki irisan perbatasan pada kawasan selat malaka, melihat struktur geografisnya dalam hal ini ketiga negara memiliki potensi akan kerja sama yang cukup besar terhadap arus kelautan yang berada pada selat malaka. Selat

malaka merupakan jalur dari lintas perekonomian laut yang mana menghubungkan arus pelayaran kapal-kapal antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, yang setiap tahunnya jumlah *trafict* dapat mencapai lebih dari 50.000 pelayaran melewati jalur tersebut.

IMT-GT sebagai kerja sama sudah dimulai sejak tahun tahun 1990an, merupakan kerja sama yang memiliki catatan panjang, dibentuk melalui keputusan Presiden No.72 tanggal 18 September tahun 1996. Berdasarkan keputusan presiden tersebut dibentuklah tim koordinasi Growth Triangle Indonesia - Thailand. didukung oleh surat keputusan tersebut Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi yang sekarang berganti nama menjadi Menko Perekonomian ditunjuk sebagai perwakilan rakyat Indonesia menjadi ketua dalam kerja sama IMT-GT. Sedangkan dalam tingkat pemerintah pusat kerja sama ekonomi subregional IMT-GT dipegang oleh Menteri Koordinator Prodis dan beberapa menteri lainnya sebagai wakil ketua dan anggota dalam kerja sama ini. Pada tingkatan daerah kerja sama IMT-GT diberikan kuasa pada tim koordinasi daerah yang diketuai oleh Gubernur setempat, pemberian mandate tersebut didasari pada pengeluaram surat keputusan Nomer 193/410/1994 tanggal 20 Juli Tahun 1994, pelaksanaan kerja sama dan koordinasi pada tingkat daerah juga dibantu oleh seluruh aparat pemerintah daerah yaitu BAPPEDA, BPKPMD, Perguruan Tinggi, dan masyarakat swasta yang melakukan kegiatan usaha pada kawasan kerja sama subregional IMT-GT (Fadhil, 2023).

Pada dasarnya pembentukan kerja sama subregional IMT-GT ini merupakan inisiasi dan tindak lanjut yang fokus untuk mendukung pengembangan kerja sama antara pemilik usaha, dalam kasusnya pihak swasta yang beradasal dari Indonesia, Malaysia, dan Thailand yang telah memiliki hubungan historis dan hubungan geografis dalam subkawasan yang terletak pada kawasan Selat Malaka. Kerja sama ini dikatakan oleh pemerintah merupakan upaya yang dilakukan pemerintah pusat dalam pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat dan upaya untuk memberikan pembangunan yang berkesinambungan pada tingkat daerah (Avianto, 2010). Dalam

konteks pembangunan kerja sama ini Pemerintah Pusat mendirikan kerja sama subkawasan IMT-GT untuk membantu meningkatkan laju perekonomian dengan melihat potensi yang ada dan ditunjang oleh keadaan geografis antar ketiga negara yang berfokus kepada masyarakat terutama pihak swasta.. Melalui kerja sama ini Indonesia, Malaysia, dan Thailand mengharapkan kerja sama yang baik antar ketiga negara dalam bidang turisme, *transport link*, dan perdagangan dan pembentukan ekonomi dalam kawasan tersebut. Yang dalam hal ini juga memberikan wadah dan mendorong sektor swasta menjadi *engine of growth* dalam kerja sama IMT-GT dengan membuka *Joint Business Council* (JBC). Yang secara aktif anggota-anggotanya juga ikut dilibatkan dalam SOM/MM IMT-GT setiap tahunnya (Kemenlu, 2018). Potensi ini juga didukung dengan adanya perkembangan dari konektivitas ICT yang dimulai pada awal tahun 2000an

Secara lebih perinci IMT-GT memberikan *framework* kerja sama *subregional*, kerja sama ekonomi dan integrasi dari anggota-anggota provinsi serta negara bagian atau provinsi antara ketiga negara pada kawasan selat malaka. Menengok kondisi letak geografis antara Indonesia Malaysia dan Thailand yang berdekatan dan bertepatan dengan letaknya yang juga strategis berada pada selat malaka.

Adapun kerja sama antara ketiga negara yaitu Indonesia Malaysia dan Thailand ini mencakup 32 provinsi serta negara bagian diantaranya :

- 14 provinsi dibagian selatan Thailand: Krabi, Nakhon Si Thammarat, Narathiwat, Pattani, Phattalung, Satun, Songkhla, Trang, Yala, Chumphon, Ranong, Surat Thani, Phang Nga dan Phuket.
- 8 negara bagian di semenanjung Malaysia: Kedah, Perlis, Perak, Penang, Selangor, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan.
- 10 provinsi di pulau Sumatra, Indonesia: Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau Bangka Belitung, dan Lampung (ADB, 2020).

Dalam penyelenggaraan IMT-GT membutuhkan badan yang bertugas untuk menjalankan semua proyek dan memantau jalannya pelaksanaan dari setiap proyek tersebut agar dapat dipastikan berhasil. Hal tersebut ditetapkan oleh IMT-GT melalui pembangunan sistem institusi dalam pengambilalihan keputusannya yang didasari pada beberapa badan yang memiliki tugasnya masing masing yang dirujuk pada IMT-GT Vision 2036.

*Leaders Summit* IMT-GT adalah badan pembuat keputusan tertinggi di kawasan subregional yang bertugas untuk membahas dan membuat kebijakan untuk kerja sama subregional. Dalam pelaksanaannya, *summit* pemimpin membahas dan mendorong masalah IMT-GT seperti pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial, dan memberikan panduan kebijakan umum tentang kerja sama dan integrasi subregional. *Summit* pemimpin juga membantu mengatur semua kebiasaan IMT-GT.

Dibawah *Leaders Summit* terdapat *Ministerial Meeting* (MM) dan *Chief Ministers and Governors Forum* (CMGF) (IMT-GT, 2020). MM merupakan pertemuan tingkat menteri yang bertugas memberikan panduan serta saran secara menyeluruh mengenai implementasi dari visi IMT-GT 2036. *Ministerial Meeting* juga memberikan saran yang bertujuan untuk mengatasi isu - isu penting dan tantangan yang ada pada penetapan kepentingan bersama serta menetapkan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dari visi 2036. Terdapat rapat tahunan ini juga menyediakan platform yang berguna bagi menteri negara anggota IMT-GT agar dapat secara terbuka membahas masalah dan kekhawatiran bersama yang dihadapi dalam proses implementasi visi 2036 dan bertukar pandangan untuk mendapatkan solusi yang mungkin dapat dilaksanakan. CMGF bertugas untuk memberikan masukan untuk kebijakan dan melakukan kolaborasi dengan *Senior Official Meeting* (SOM) serta MM untuk meningkatkan efektivitas dari implementasi visi IMT-GT 2036 pada tingkat pemerintah daerah. CMGF bertugas untuk meningkatkan kesadaran pada tingkat pemerintah daerah mengenai tujuan, sasaran, program, dan proyek pada visi IMT-GT 2036 terhadap peluang serta manfaat langsung dan tidak langsung. Sebagai

badan penting dari tim pelaksana proyek CIMGF juga bertugas untuk mempromosikan proyek *bottom up* dan masukan untuk inkorporasi terhadap visi IMT-GT 2036 dan bekerja sama dengan komunitas dan bisnis lokal serta mengoordinasi fasilitas yang dibutuhkan proyek IMT-GT tingkat pemerintah daerah. CMGF juga melakukan koordinasi agenda kerja sama lingkungan di bawah *Environment Focus Area*.

Dibawah dari MM dan CMGF terdapat Senior Official Meeting (SOM) yang bertugas untuk menentukan prioritas untuk implementasi serta memberikan arahan serta saran mengenai visi IMT-GT 2036 untuk memastikan jalannya koordinasi dan integrasi pada acuan pendekatan, perhitungan dan strategi. SOM juga mengawasi keseluruhan implementasi langkah dan strategi ketepatan waktu dan efektivitas dari program yang dijalankan. SOM secara langsung mengajak representasi senior dari partner organisasi serta pemimpin penting pada industri terkait dengan tujuan untuk menjalin kerja sama strategis, mendapatkan sumber daya, mendapatkan ahli dan teknologi pada bidang terkait implementasi proyek.

Untuk fungsi koordinasi terdapat beberapa badan yang memiliki tugas untuk menghubungkan kejasama IMT-GT dengan pihak swasta maupun pemerintah (Mien, 2017). *National Secretariat* (NS) bertugas untuk mendukung SOM dalam operasionalisasi visi IMT-GT 2036. Bertindak sebagai *focal point* nasional untuk melakukan koordinasi dan pemantauan program dan proyek visi IMT-GT 2036. Pada tingkat pemerintahan NS memastikan program dan proyek visi IMT-GT 2036 dimasukan dan diprioritaskan dalam rencana pembangunan nasional dan sehingga mendapatkan dukungan kebijakan dan pendanaan yang memadai dari pemerintah pusat. Dalam pelaksanaannya NS berusaha untuk melibatkan pemerintah provinsi, sektor swasta, dan pemangku kepentingan IMT-GT lainnya pada identifikasi, perencanaan, dan implementasi proyek sesuai dengan pendekatan *bottom up*. Sementara *Joint Business Council* (JBC) pada IMT-GT akan bertindak sebagai fokus point sektor swasta untuk mendorong sektor swasta mengejar peluang perdagangan

dan investasi yang diciptakan oleh Visi 2036. Ini akan memperluas keanggotaannya untuk melibatkan UMKM, perusahaan sosial biasa dan perwakilan dari perusahaan besar. JBC akan mengumpulkan, melakukan konsolidasi, dan memprioritaskan masukan kebijakan dan ide proyek dari keanggotaannya untuk mencapai tujuan inklusif Visi IMT-GT 2036. Anggota JBC akan menjadi pelaksana utama proyek Visi 2036. Sebagai anggota kunci dari Tim Implementasi Proyek, JBC akan terlibat dalam dialog dan perundingan reguler dengan WG, NS, SOM dan MM untuk memastikan isu dan tantangan terkait implementasi Visi IMT-GT 2036.

*Working group* (WG) berfungsi sebagai pelaksana SOM pada area fokus masing-masing berdasarkan visi IMT-GT 2036, yang bertugas untuk mengoordinasikan dan memfasilitasi implementasi program serta proyek di bawah tujuh pilar strategis. enam Kelompok Kerja sektoral yang ada akan dipertahankan. Program dan proyek di bawah lingkungan akan dilaksanakan oleh CMGF dan difasilitasi oleh CIMT. Pengaturan tersebut berdasarkan pengalaman dan inisiatif dari Green City yang sedang berjalan dan menunjukkan efektivitasnya dan menetapkan hal tersebut menjadi aturan sementara. Dalam jangka panjang WG yang lengkap pada bidang lingkungan mungkin akan diperlukan. *Subworking group* ICT dimasukkan pada WG Transport and Connectivity untuk memfasilitasi program dan proyek ICT. Terdapat perubahan pada beberapa sektor WG, perubahan pada WG dapat terjadi dari waktu ke waktu mengikuti pada kebutuhan yang diperlukan pada kerangka acuan WG yang ada, dan dapat diperbaharui untuk memastikan efektivitas implementasi visi IMT-GT 2036. Beberapa WG tersebut berupa : *WG on Agriculture and Agro based Industry, WG on Tourism, WG on Halal Products and Services, WG on Transport and ICT Connectivity, WG on Trade and Investment and, WG on Human Resource Development, Education and Culture* (Mien, 2017).

Berdasarkan kajian dan perencanaan yang telah ditetapkan oleh *Subworking group* ICT dalam kaitannya telah menyelenggarakan kerja sama ekonomi berbasis digital sebagai upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan konektivitas

infrastruktur digital antar ketiga negara yang berupa IMT-GT *Ecommerce*. Platform *Ecommerce* IMT-GT merupakan platform berbasis *mall online* yang memiliki tujuan untuk mendorong pelaku usaha mikro kecil menengah agar dapat memiliki pasar yang lebih luas dan dapat bersaing pada era digital ini.

IMT-GT *Ecommerce* pertama kali mendapatkan usulan dalam Pertemuan Perencanaan Strategis (SPM) IMT-GT ke-12 pada 14-16 Maret 2019 di Kelantan, Malaysia. Yang dalam Penyelesaian dan implementasi platform ini juga melibatkan seluruh *Working group* dan *Subworking Grup* ICT dalam kerja sama IMT-GT dan berbagai lapisan pemerintahan negara - negara anggota (IMT-GT, Introduction, 2020). Dalam pelaksanaannya *Subworking group* ICT yang merupakan salah satu *Subworking Grup* merupakan bagian yang bekerja sama dengan IMT-GT khusus dalam membahas dari perkembangan dan kerja sama dalam bidang ICT, yang dalam hal ini membentuk kerja sama IMT-GT *Ecommerce*. (Subregional, 2021). Dasar dari dilaksanakannya program IMT-GT berasal dari *implementation blueprint* 2017-2021 yang telah disepakati oleh forum kerja sama IMT-GT yang tercantum penjelasannya pada lembar *strategic Framework of Transport* dan *ICT Connection Fokus Area*, yang dikerjakan oleh *Subworking group* ICT dengan fokus objektif dan strategi yang akan dijelaskan di bawah.

Objektif dari *Subworking Grup* ICT :

- Mengembangkan kerja sama berupa *online business* bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dengan indikator perkembangan berupa jumlah pelaku usaha digital dibawah IMT-GT.
- Meningkatkan daya saing UMKM melalui IMT-GT. Dengan indikator berupa jumlah UMKM di bawah IMT-GT yang menggunakan ICT untuk mengubah sistem kerja mereka.
- Meningkatkan konktivitas ICT. Dengan indikator berupa penambahan pengguna akses *broadband* pada populasi masyarakat IMT-GT.

Strategi dari *Subworking group* ICT :

- Meningkatkan kesadaran dan mengembangkan kapasitas pada aktivitas bisnis *online* seperti *ecommerce* dan *epayment* untuk UMKM.
- Meningkatkan kesatuan pada teknologi yang terpecah seperti teknologi seluler, *big data*, *Internet of Thing*, dan *cloud* teknologi agar dapat lebih efisiensi dan dapat meningkatkan produktivitas bisnis.
- Membangun dan meningkatkan Infrastruktur dan layanan ICT (Mien, IMT-GT IMPLEMENTATION BLUEPRINT 2017-2021, 2017).

Kerja sama ini tentunya merupakan langkah baik dalam membangun perkembangan ekonomi bagi daerah-daerah yang tercakup pada kerja sama *Subregional* ini tidak akan berhenti pada pembangunan jalur perdagangan dan logistic antara ketiga negara ini, namun juga akan mengembangkan dalam bidang ICT sebagai jawaban dalam mengatasi arus perkembangan global. Dalam perkembangan teknologi yang kian merebak dan era globalisasi program IMT-GT *Ecommerce* yang dibangun ini diharapkan dapat menjadi jembatan pembangunan bagi sektor ICT yang diharapkan dapat menjadi pendukung dalam pembangunan ekonomi bagi sektor UMKM dalam kawasan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam objektif dan strategi berdasarkan tugas dari *Subworking group* ICT pada Implementasi *Blueprint* IMT-GT 2017-2021.

Dalam implementasi kerja sama IMT-GT *Ecommerce* sebagai fokus dari *Subworking group* ICT yang baru juga memiliki tantangan dalam membuat sebuah sistem yang dapat terakses dengan mudah oleh masyarakat, dapat bersaing dengan sistem yang sudah ada, dan memiliki kesinambungan sistem yang dapat menyatukan UMKM antara ketiga negara ini dalam sistem yang lebih baik.

Sehubungan dengan kerja sama ekonomi digital pada taraf *subregional* ataupun *ecommerce*, telah banyak penelitian yang membahas mengenai hal tersebut. Pada penelitian kali ini penulis mendasarkan pemikiran berdasarkan tinjauan - tinjauan pustaka yang diharapkan menjadi penunjang argumentasi dari penelitian yang didasari oleh pemikiran yang telah tertuang dalam bahan-bahan pustaka, serta menjadi perbandingan antara penelitian ini terhadap penelitian - penelitian yang sudah ada, sehingga dapat membuktikan bahwa penelitian yang dilaksanakan ini layak untuk diteliti.

Sebagaimana isu regionalisme terus berkembang bentuk kerja sama baru sebagai kerja sama *subregional* juga turut berkembang, yang dalam setiap bab *Subregionalism and World Order*, Hook (1999) membahas mengenai kemunculan fenomena subregionalisme, bagaimana kaitannya dengan trend ekonomi dunia yang terus bergerak menuju era globalisasi. Buku ini menjelaskan mengenai pengamatan - pengamatan yang berupa bukti empiris yang menunjukkan secara singkat implikasi - implikasi dari kerja sama subregional yang telah terjadi dalam beberapa kelompok kerja sama yang diamati oleh beberapa penulis bab. Penulis memilih buku ini dikarenakan terhadap keberagaman struktur kerja sama *subregional* yang dibahas mengungkapkan bahwa terdapat sistem umum dalam kerja sama *subregional* yang ada namun juga setiap kerja sama tersebut memiliki suatu sistem yang mengadaptasi dari perbedaan antara setiap negara dalam kelompok tersebut sehingga membentuk perbedaan fitur antara setiap kerja sama *subregional* yang ada. Berdasarkan Jurnal *China's Reach: Subregional Economic Cooperation in Southeast Asia* yang ditulis oleh Phanaransan (2006) dijelaskan latar belakang kerja sama *subregional* antara China dengan negara-negara Asia Tenggara jurnal ini menjelaskan faktor pendorong adanya kerja sama *subregional* yang terjadi dikarenakan oleh keadaan dan kepentingan yang dirasakan kedua belah pihak, politik dan ekonomi antar China dengan negara-negara Asia Tenggara, serta adanya faktor geografi, kultural, sosial antara China dan negara-negara tersebut. Faktor ini menjelaskan strategi - strategi

ekonomi terhadap salah satu provinsi China yaitu Yunnan dan lima negara daratan Asia Tenggara telah muncul. Kedua tingkat kerja sama ekonomi, *subregional* dan *regional*, berjalan secara simultan dan simbiosis. Serta Pandangan penulis terhadap integrasi infrastruktur antara beberapa negara dalam kerja sama *subregional* ini juga tergambar dari pembahasan pada *Booming Border*.

Selanjutnya melihat kerja sama IMT-GT dalam ruang lingkupnya seperti yang dijelaskan oleh Lord (2014) menjelaskan kerja sama IMT-GT pada masa kerja blueprint 2012-2016 dan pembangunan kerja sama yang dilakukan ini dilihat melalui keterkaitan antara perbatasan - perbatasan yang ada antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Thailand, maupun Thailand dengan Malaysia. Dalam tulisannya juga menjelaskan mengenai detail dari sifat-sifat yang ada pada daerah yang terlingkup oleh kerja sama IMT-GT serta menjabarkan *development plan* yang dimiliki pada setiap perbatasan. Selain itu juga mengambil tulisan dari Avianto (2010) mengenai Distorsi Kapasitas Perdagangan Inter-Regional IMT-GT Kasus Provinsi Terpilih di Sumatera Indonesia bahwasanya kerja sama IMT-GT ini masih belum menemukan titik optimalnya dalam melaksanakan tugas kerja samanya sebagai regulator pembangunan untuk UMKM yang ada. Pentingnya memiliki optimalisasi pada setiap wilayah yang tercantum agar mendapatkan manfaat yang disediakan oleh IMT-GT sebagai pemerataan dalam pembangunan daerah *subregional* pada Indonesia.

*Regionalism, Multilateralism and Economic Integration* yang ditulis oleh Sampson (2003) menjelaskan mengenai kebijakan dan kesepakatan regional yang mungkin akan menutup peluang kerjasama dibawah dari kerja sama regional tersebut yang dalam penelitian ini adalah kerja sama IMT-GT. Dalam literatur ini menjelaskan apakah *Regional Trade Agreement* (RTA) berfungsi sebagai suatu infrastruktur atau malah merupakan batu sandungan untuk penghapusan hambatan regulasi perdagangan. *General Agreement on Trade in Services* (GATS) menghasilkan munculnya rezim multilateral yang berurusan dengan perdagangan jasa, yang mencakup seperangkat prinsip dan pendekatan untuk liberalisasi perdagangan jasa.

Berbeda dengan liberalisasi pada sektor barang, fokus liberalisasi pasar jasa adalah pada peraturan perundang-undangan domestik yang menjadi penghambat perdagangan jasa. Selain itu juga pada literatur yang dengan judul Peran dan Tantangan Kerja sama *Subregional* dalam Mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA): Pendekatan *Multilevel Governance* yang ditulis Riyanto (2015) menyatakan peranan kerja sama dalam berbagai level kerja sama antar pemerintahan yang saling berpengaruh terhadap jalannya kerja sama *subregional*. Selanjutnya terdapat literatur yang ditulis oleh Hernovianty (2016) yang menjelaskan desentralisasi ekonomi pada kawasan perbatasan khususnya kerja sama *subregional* dan konsentrasi geografis yang berperan dalam pertumbuhan wilayah.

Perkembangan teknologi yang *massif* pada abad ke 21 ini memberikan dampak yang besar bagi negara-negara yang ada. berdasarkan *The Global Digital Economy* yang ditulis oleh Holroyd (2015) menjelaskan mengenai upaya yang dilakukan negara dalam menyikapi perkembangan ekonomi global yang mana memaksa negara-negara berkembang sedemikian rupa agar dapat bersaing secara kompetitif dalam pasar global. Negara-negara ini juga saling bekerja sama dalam membangun dalam membangun pondasi bagi sektor-sektor privat dan membangun pertumbuhan komersil yang berada pada ruang lingkup ICT. Juga dalam halnya literatur ini menjelaskan strategi negara seperti halnya merekrut sumber daya manusia yang mampu untuk mengerjakan infrastruktur digital yang ada dan bagaimana kesulitan yang dihadapi negara dalam beradaptasi dengan era globalisasi. Selain itu juga mengambil literatur berjudul Manfaat Penerapan Strategi *Digital Single market* (DSM) Di Kawasan Uni Eropa Tahun 2015–2018 yang ditulis oleh Purnawan (2022) dijelaskan bahwa penerapan kebijakan *ecommerce* dengan ketentuan *single market* yang dapat diakses banyak negara menggunakan suatu ketentuan. Yang terakhir berasal dari literatur *The Impacts of Ecommerce to Regional Integration in Southeast Asia* oleh Pertiwi (2019) menjelaskan dampak sosial dan integrasi pada kawasan Asia

Tenggara yang diakibatkan oleh perdagangan elektronik, serta menganalisis perilaku aktor perdagangan tersebut.

Dilihat dari penelitian penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya penulis melihat bahwa ada pada topik mengenai kerja sama digital pada ruang lingkup *subregional* belum mendapatkan studi kasus yang memadai, terkhusus pada kerja sama yang dilaksanakan oleh Indonesia Malaysia Thailand *Growth Triangle* dalam rancangan pembangunan infrastruktur digital berupa *IMT-GT Ecommerce*.

## 1.2 Rumusan Masalah

Pembangunan ICT yang merupakan program yang tergolong baru sebagai *subworking group* yang didukung juga oleh badan-badan terkait termasuk juga kementerian Teknologi dan Informatika, merupakan upaya yang dilakukan oleh IMT-GT sebagai upaya dalam mengimbangi kerja sama antara perkembangan pembangunan konektivitas layanan logistic secara fisik maupun digital yang terutama ditujukan bagi UMKM pada ketiga negara sejalan dengan rencana *blueprint* yang dimiliki oleh IMT-GT. Melalui kerja sama ketiga negara yang menciptakan IMT-GT *Ecommerce* sebagai platform jual beli digital sebagai kerja sama antara ketiga negara yang mengusung beberapa platform lokal yang ada.

Membuat infrastruktur digital untuk meningkatkan efektivitas pembangunan dan kerja sama bagi UMKM ketiga negara memiliki tingkat kesulitannya tersendiri. Dalam halnya peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: **Bagaimana pelaksanaan kerja sama Indonesia Malaysia dan Thailand dalam proyek IMT-GT *Ecommerce* 2019-2021.**

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang masalah serta batasan dari rumusan masalah, penelitian ini ditujukan untuk menganalisis

kerja sama ketiga negara pada proyek IMT-GT *Ecommerce* yang dibangun untuk menjadi infrastuktur digital dalam Subregion.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dalam melakukan penelitian ini:

1. Manfaat akademis, pada penelitian kali ini diharapkan hasil dari penelitian dapat memberikan perkembangan pada teori serta konsep yang telah ada, serta juga diharapkan dapat menambah literatur dan wawasan serta juga diharapkan dapat berkontribusi bagi ilmu Hubungan Internasional dalam kerja sama *Subregional* dalam bidang pengembangan teknologi.
2. Manfaat praktis, dari penelitian yang dilaksanakan diharapkan dapat menjadi rujukan dalam memberikan informasi mengenai kerja sama *Subregional* antara Indonesia, Malaysia dan Thailand dalam pembangunan proyek infrastruktur digital IMT-GT *Ecommerce*.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan penelitian ini penjabaran tulisan akan dibagikan dalam beberapa bagian yang terdiri dari bab dan subbab. Dalam sistem penulisan yang membagi hasil dari penelitian dalam lima bab, yaitu.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tinjauan pustaka, membandingkan penelitian ini dengan berbagai penelitian yang relevan dan sudah terlaksana sebelumnya, kerangka pemikiran, alur pemikiran, dan asumsi dasar.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab III membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini dan bagaimana penulis melakukan penelitian serta sumber data yang akan penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini.

### **BAB IV POTRET KERJA SAMA SERTA POTENSI DALAM PEMBANGUNAN IMT-GT *ECOMMERCE***

BAB IV akan memuat mengenai gambaran umum terhadap kerja sama ekonomi digital yang telah dilaksanakan oleh IMT-GT, melihat bagai mana pemerintah negara anggota IMT-GT dalam membangun struktur ICT dalam negaranya masing - masing, serta melihat dasar kerja sama yang digunakan oleh IMT-GT untuk merumuskan proyek ICT pada *subworking group*nya.

### **BAB V PENGEMBANGAN PROYEK IMT-GT *ECOMMERCE* BESERTA PELUANG DAN TANTANGANNYA**

BAB ini akan menjabarkan mengenai analisis serta data yang didapat mengenai bagaimana kerja sama IMT-GT tersebut dilaksanakan serta melihat dengan kacamata subregionalisme dan ekonomi digital mengenai bagaimana prospek kerja sama ekonomi digital, peluang, dan tantangan yang terjadi antara Indonesia, Malaysia dan Thailand dalam kerja sama IMT-GT *Ecommerce*.

### **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

BAB ini akan menjadi penutup dari Penelitian ini yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.